



Dongkrak PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Pastikan PBB dan NJOP Tak Naik

SUNGAI RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan upaya peningkatan PAD dilakukan dengan tetap menjaga komitmen agar tidak membebani masyarakat, khususnya terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) serta nilai jual objek pajak (NJOP).

"Kita harus mendongkrak PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun, di sisi lain kami juga tidak ingin memberatkan masyarakat. Saya pastikan terkait PBB dan NJOP tidak akan ada kenaikan. Meski ada temuan BPK bahwa selama lima tahun terakhir kita belum melakukan updating, kami berharap BPK bisa memahami kondisi ini," kata Sujiwo, Senin (25/8), usai Rapat Paripurna mengenai RAPBD Perubahan Kabupaten Kubu Raya di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya.

Sujiwo mengatakan, pemerintah kabupaten akan mencari solusi kreatif untuk menopang pembiayaan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur. Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan memperkuat kerja sama bersama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah

provinsi, maupun DPRD Kubu Raya.

"Kami akan terus membangun komunikasi agar sumber pembiayaan pembangunan dapat dimaksimalkan. Selain itu, kami juga mendorong para pelaku usaha agar menunaikan kewajibannya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR masing-masing," jelasnya.

Sujiwo menilai, keberadaan CSR dari perusahaan yang berinvestasi di Kubu Raya sangat penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar kegiatan usaha.

"Kami berharap para pengusaha benar-benar menunaikan kewajiban CSR-nya dengan baik, terutama di lingkungan sekitar. Dengan langkah-langkah seperti ini, kami memastikan pembangunan bisa berjalan optimal tanpa harus membebani masyarakat kecil," ujarnya.

Sujiwo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dia memastikan kelompok menengah ke bawah tidak akan menjadi pihak yang terbebani dalam pembiayaan pembangunan daerah.

"Kami pastikan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, tidak akan dibebani dalam membiayai pembangunan. Pemerintah akan terus melakukan inovasi dan terobosan agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan seluruh masyarakat Kubu

Raya," pungkasnya.

Difokuskan Sektor Industri Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya

Muhammad Amri, mengungkapkan hingga 2025 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2019 sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Padaحال, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika NJOP diperbarui sesuai kondisi riil saat ini.

"Kita di Kubu Raya masih pakai NJOP 2019 sampai 2025. Artinya, nilai itu sudah 'tua' dan tidak lagi mencerminkan kondisi harga tanah dan bangunan sekarang," jelas Amri, Senin (25/8).

Dia menegaskan, penyesuaian NJOP memang akan berdampak langsung pada kenaikan PBB. Namun kebijakan itu tidak boleh serta-merta membebani masyarakat kecil.

"Kalau NJOP naik, PBB pasti naik. Tapi jangan langsung kena ke masyarakat bawah. Ini harus tepat sasaran," tegasnya.

Komisi IV DPRD Kubu Raya, lanjut Amri, mengusulkan agar penyesuaian NJOP difokuskan pada sektor industri dan komersial yang selama ini menikmati pertumbuhan ekonomi pesat.

Meski BPK tidak menyebutkan angka pasti, Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini penyesuaian NJOP di kawasan strategis dapat membuka potensi pendapatan baru yang signifikan bagi Kubu

Raya.

"Belum ada angka resmi dari pemerintah, tapi yang jelas ada potensi. Dan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat APBD, membiayai pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik," ujarnya.

Amri juga menegaskan, wacana penyesuaian NJOP tidak boleh menyasar rumah tinggal sederhana, terutama yang berada di gang sempit atau kawasan padat penduduk.

"Kami sangat hati-hati. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat rakyat kecil sakit. NJOP naik, PBB naik, itu pasti. Tapi harus proporsional dan adil," tegasnya.

Komisi IV DPRD Kubu Raya sambungnya, juga mendorong Pemkab Kubu Raya segera menindaklanjuti temuan BPK dengan kebijakan yang selektif dan bertahap.

"Kalau mau serius tingkatkan PAD, ini saatnya. Tapi lakukan dengan kebijakan yang cerdas, tidak gegabah, dan tetap melindungi masyarakat kecil," tutup Amri. (ash)



ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST

SERAHKAN: Sujiwo menyerahkan Jawaban Bupati kepada Wakil Ketua DPRD Kubu Raya dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terkait RAPBD Perubahan 2025 di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Senin (25/8).